

INTEGRASI EKSPOR KOPRA MAKASSAR DI ANTARA KONTINUITAS DAN DISKONTINUITAS

A. Rasyid Asba

Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, Makassar 90245, Indonesia

E-mail: *rasbawecu@yahoo.com*

Abstrak

Kajian tentang perdagangan kopra Makassar hingga kini belum banyak mendapat perhatian di kalangan sejarawan Indonesia, meskipun disadari bahwa komoditas tersebut menjadi bagian yang penting dalam dunia perdagangan. Kajian ini merupakan suatu sumbangan untuk melengkapi kekurangan dalam bidang ini, yaitu menyoroti secara khusus terintegrasinya pulau-pulau di Indonesia bagian timur, baik hubungannya dengan Makassar maupun pasar dunia. Fokus kajiannya adalah ditujukan pada ekspor kopra Makassar, sedangkan jangkauan temporalnya di batasi pada periode tahun 1883-1958. Dalam kajian ini, ekspor kopra Makassar dibagi dalam dua tahap perkembangan, pertama adalah masa ekspansi dan yang kedua adalah masa kontraksi. Dalam masa ekspansi, ekspor kopra Makassar menunjukkan kemajuan yang gemilang dan mengagumkan, sedangkan masa kontraksi Ekspor kopra Makassar menunjukkan kemunduran, kesuraman dan hilangnya harapan.

Abstract

The study on Macassar Copra to date has not got much concern from Indonesian Historians, though it is realized that the commodity was the urgent in the world trading. This study constitutes a contribution to complement the shortcoming in this field, that is, in special manner, by spotlighting the integration of the islands in the eastern part of Indonesia, their relation with both Macassar and the world market. The focus of this study was the export of Macassar copra while its period limit was within 1883-1958. In this study, Macassar copra export was divided into two development stages. First, the expansion period and the second was contraction period. During the expansion period, the export of Macassar copra indicated a bright and amazing progress, while the contraction period showed the decline, vague and hopeless.

Keywords: Makassar copra, the world trading

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Selama kurang lebih “*delapan dasawarsa*” ekonomi Makassar banyak tergantung dari kopra atau “*emas hijau*” (Kompas, 3 Februari 1991). Bagaimanapun penduduk Indonesia bagian Timur, khususnya Sulawesi Selatan, kopra telah menjadi komoditi dagang yang utama, sejak tahun 1880-an yaitu, ketika bangsa-bangsa Eropa menggunakan kopra sebagai bahan dasar yang penting dalam pembuatan sabun dan mentega. Dari jumlah ekspor kopra Indonesia Timur, 60 persen pendapatan daerahnya tergantung dari kopra. Dari jumlah itu 70% diekspor melalui pelabuhan Makassar (J. Dol. *Landbouw* 21, 1949, hal 85). Itulah sebabnya J.C. Westermann dan W.C. Houck

mengatakan bahwa pada dekade kedua abad ke-20 Makassar tampil sebagai kekuatan perdagangan di Asia Pasifik, bahkan pada periode tersebut Makassar dapat mengimbangi Singapura sebagai kota dagang di Asia Pasifik.

Makassar sebagai pusat perdagangan akan dijelaskan sebagai bagian dari ekonomi dunia. Tentu dengan sendirinya akan diuraikan kontribusi Makassar terhadap perluasan perdagangan kopra di pasaran dunia, tata-niaga perdagangan kopra dan bagaimana peranan orang-orang pribumi, Cina, Eropa memperebutkan dan mengontrol perdagangan kopra akan diuraikan perubahan-perubahan dalam skala makro sehingga integrasi kopra Makassar dalam pasaran dunia dapat dijelaskan. Selain itu juga akan diuraikan munculnya dominasi negara mengatur perdagangan kopra yang

pada akhirnya membawa konflik hubungan antara pusat dan daerah.

Dominasi pemerintah mengatur perdagangan kopra mengakibatkan eksportir semakin tidak menentu. Dalam tahun 1952 jumlah ekspor Kopra Makassar hanya 279.600 ton, bahkan menurun sampai 111.000 ton pada tahun 1956 (AND, NHM Makassar No. Inventarisasi 5114). Penurunan ekspor itu membuat Yayasan kopra semakin tidak berdaya. Utang Yayasan Kopra mencapai Rp102.146.702,99. Kehancuran Yayasan Kopra disebabkan oleh terlalu tingginya berbagai pengeluaran yang harus ditanggung. Pengeluaran itu antara lain: keamanan Propinsi Sulawesi 30%, biaya operasi kepolisian 30 % dan 40 % untuk pembangunan sosial (Arsip dan Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan dalam Arsip Pribadi M. Saleh Lahade. Dos. 270). Hal itu bertentangan dengan pasal 19 Anggaran Dasar Yayasan Kopra yang menetapkan bahwa hasil usaha harus digunakan sebagai berikut: 25 % untuk cadangan, 20 % anggota penyimpanan, 25 % untuk para pemakai jasa Yayasan, dan masing-masing 5 % untuk dana pegawai, pendidikan, sosial, dan 10 % untuk pengembangan Yayasan (Arsip Nasional Den Haag, NHM Makassar No. Inventarisasi 5114). Pembagian itu menunjukkan bahwa alokasi biaya untuk pengembangan Yayasan sangat rendah. Pengalokasian biaya yang rendah itu lebih diperparah lagi adanya portes Daerah terhadap Pemerintah Pusat Jakarta Perbedaan yang tajam antara pusat dan daerah mengakibatkan semakin berkembangnya sistem barter secara langsung.

Konflik antara pusat dan daerah ditandai dengan adanya Pergerakan Permesta yang menuntut agar hasil perdagangan kopra 70% untuk pembangunan daerah dan 30 % untuk Pemerintah Pusat di Jakarta (Arsip dan Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan. Arsip Pribadi M. Saleh Lahade. Reg no. 325). Pembagian itu didasarkan pada tuntutan Andi Pangerang Daengparani tentang penegakan Otonomi Daerah seperti yang termuat dalam UUDS. Akibat penolakan tuntutan itu berbagai perwira dan tokoh-tokoh nasional di daerah menuntut hak barter agar dibebaskan menjual kopra untuk membiayai pembangunan daerah. Daerah-daerah penghasil kopra menuntut agar peraturan ekspor kopra ditinjau ulang kembali. Wilayah Indonesia yang terletak pada 116° Bujur Timur (Indonesia Timur dan Kalimantan Barat) tidak hanya menjual kopranya ke Yayasan Kopra, tetapi juga meminta hak barter kopra dari Indonesia Timur seperti hak barter kopra yang diberikan pada wilayah-wilayah yang terletak pada sebelah Barat garis 116° Bujur Timur (Sumatra dan Jawa). Larangan mengekspor kopra secara langsung ke Singapura dapat menambah gejolak politik daerah di Indonesia Timur karena dianggap tidak adil. Menurut Ratulange Gubernur Sulawesi ketika itu, perilaku politik perkopraan merupakan dominasi kekuasaan yang jauh lebih dahsyat daripada zaman kolonial (Arsip

dan Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan, Arsip Pribadi M. Saleh Lahade Reg. No 325).

Permasalahan Penelitian

Ketika ekspor kopra meningkat di Makassar, Makassar muncul sebagai bagian ekonomi dunia. Hubungan Makassar dengan pasar kopra dunia berkembang sesuai dengan ritme pasar. Eksportir Eropa dan Cina di Makassar dapat memperluas usahanya di wilayah Timur Besar, bahkan di pasaran Eropa dan Amerika. Integrasi pulau-pulau di Wilayah Timur Besar dengan pasaran dunia menyatu, sehingga Makassar muncul sebagai pusat perdagangan kopra di Hindia Belanda.

Tingginya permintaan ekspor kopra Makassar di pasaran dunia di satu pihak dan terbatasnya produksi kopra di lain pihak menimbulkan pertanyaan penting. Mengapa Makassar mampu memenuhi permintaan kopra di pasaran dunia dan muncul sebagai pusat perdagangan kopra di Hindia Belanda? Apakah dengan tidak menonjolnya Makassar sebagai penghasil kopra membuat pulau-pulau di Wilayah Timur Besar (Indonesia bagian timur) terintegrasi dengan Makassar? Ataupun hal ini karena lebih disebabkan karena Makassar muncul sebagai pusat perdagangan ataupun lebih banyak disebabkan oleh kehadiran berbagai eksportir kopra di Makassar yang menyediakan fasilitas kredit? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengundang permasalahan pokok untuk dikaji dalam penelitian ini. Hal itu penting untuk menjawab permasalah sejarah “Mengapa ekspor kopra Makassar antara tahun 1883 hingga tahun 1930 terjadi ekspansi dan antara tahun 1930 sampai dengan tahun 1958 terjadi kontraksi?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perdagangan Kopra Makassar, khususnya dalam terbentuknya politik emporum Kolonial Belanda di Indonesia bagian timur di mana kopra sebagai barang dagangan utama dari pelabuhan Makassar selama kurang lebih tiga perempat dasawarsa. Sejarah yang dihasilkan adalah suatu bentuk penulisan sejarah ekonomi kritis yang memahami mekanisme kausal antara struktur dan konjungtur yang dapat mempengaruhi peristiwa (*event*). Penelitian ini diharapkan menjadi model kebijakan dalam pembangunan ekonomi dan politik hubungan antara pusat dan daerah, khususnya dalam mengembangkan ekonomi kepulauan yang lebih baik di masa depan.

Hasil Penelitian

Terbentuknya Jaringan Perdagangan Kopra Makassar

Setelah konferensi pengangkutan Batavia atau “*Batavia Vracht Conferentie*” (BVC) pada tahun 1900, kapal-kapal besar yang masuk di Makassar mulai diatur secara ketat. Kapal-kapal yang boleh mengangkut kopra adalah kapal yang telah masuk dalam organisasi BVC. Kapal-

kapal yang tidak mendapat izin dari *Batavia Vracht Conferentie* tidak diperkenankan beroperasi di wilayah Hindia Belanda, khususnya dalam perdagangan antar pulau.

Dalam konferensi itu juga diputuskan undang-undang tarip pengangkutan kapal-kapal yang masuk di Hindia Belanda, termasuk pengaturan *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM) sebagai organisasi perusahaan perkapalan Belanda yang diberikan kebijakan khusus untuk memonopoli pengangkutan di Hindia Belanda.

Dalam kebijakan ekspor kopra diputuskan bahwa kopra dari Makassar diekspor secara langsung ke Eropa, tanpa melalui Singapura atau Batavia, dengan alasan bahwa tarip pengangkutan lebih rendah, bila dibandingkan dengan sistem pengangkutan yang tidak langsung. Itulah sebabnya perusahaan kapal uap seperti Noorsche Lloyd dan Celebes Lloyd yang berpusat di Eropa secara langsung dan teratur mengangkut kopra dari Makassar. Akibatnya adalah hubungan dagang Singapura dengan wilayah-wilayah Timur Besar entitasnya menurun karena pedagang-pedagang Cina Makassar lebih diarahkan mengespor kopra secara langsung ke Eropa.

Dalam tahun 1902 sebagian besar kopra Makassar diangkut langsung ke Eropa, kecuali perusahaan dagang Mohrmann & Co., yang masih membeli kopra melalui perusahaan Behn Meyer & Co., yang berpusat di Singapura. Akibatnya adalah banyak perusahaan Cina di wilayah Timur Besar yang bergerak dalam perkopraan melepaskan hubungan dagangnya di Singapura. Begitu pula beberapa pedagang-pedagang Cina di Jakarta dan Semarang mengalihkan hubungannya karena pedagang-pedagang Cina di Makassar tidak lagi berhubungan langsung dengan Singapura.

Monopoli KPM melalui undang-undang tarif angkutan kapal-kapal yang diatur oleh BVC berpengaruh langsung pada tata-niaga kopra, yaitu munculnya pola baru dalam tata-niaga kopra. Di ujung sistem niaga kopra itu diduduki oleh perusahaan dagang Eropa yang mendapat dukungan dari perusahaan perkapalan. Orang-orang Cina yang sebelumnya menduduki posisi pertama berada di urutan kedua setelah pengusaha Eropa. Pedagang-pedagang pribumi yang kebanyakan pedagang perantara (pa'palele) dan petani kelapa berada pada lapisan bawah dalam pola tata-niaga itu. Para pedagang Eropa mulai membangun jaringan baru dengan para pedagang Cina (Makassar: tokea), dan para pedagang perantara (Bugis: papalele) yang sebelumnya menguasai pengangkutan dengan sistem Commenda.

Setelah KPM menguasai pengangkutan, pedagang-pedagang Cina tampaknya lebih efektif berhubungan dengan kapal KPM. Perahu-perahu pribumi kalah bersaing dengan KPM karena menuntut lebih banyak modal, jaringan organisasi yang rapih, dan fasilitas

pengangkutan yang lebih modern. Bagi para pedagang pribumi perubahan dari perdagangan tradisional menuju perdagangan modern menunjukkan bahwa batas keuntungan tidak lagi ditetapkan oleh perbedaan regional dalam permintaan dan penawaran, namun melalui mekanisme harga pasaran dunia yang kompleks dan berada di luar kontrol dan pengalaman pedagang pribumi. Meskipun KPM memakai manajemen pengangkutan yang lebih profesional, sebagian pedagang Cina masih memakai pelayaran tradisional (Armada Semut) karena mereka terikat dengan sistem produksi dengan elite lokal yang juga memiliki perahu dan kapal-kapal besar. Kehadiran "Armada Semut" itu sangat bermanfaat untuk menekan kebijakan KPM agar tidak mudah menaikkan biaya tarif pengangkutan (ANRI, *Memorie van Overgave Stuurman*, 1936, hal. 99).

Dengan terbentuknya berbagai maskapai pelayaran Di Indonesia Timur itu kesulitan pengangkutan pada masa perang telah teratasi. Bahkan pada masa Negara Indonesia Timur integrasi perdagangan antar pulau semakin meningkat. Itu ditandai dengan meningkatnya jumlah ekspor kopra, yaitu dari 260 ton pada tahun 1938 menjadi 374 ton tahun 1949.

Pada bulan Desember tahun 1950 Dewan Komisaris KPM menyadari bahwa perusahaannya tidak lagi memiliki masa depan di Indonesia karena investasi perdagangan antar pulau dihentikan. Pemesanan kapal baru tetap dilanjutkan tetapi diperuntukkan bagi perdagangan luar negeri. Setelah PELNI dibentuk dalam tahun 1952 KPM mulai membicarakan masalah pengundurannya. Kapal-kapal yang ada terus digunakan di Indonesia selama masih menguntungkan. Namun itu tidak berlangsung lama karena modal saham perusahaan semakin merosot. Pada tahun 1952 KPM mengangkut 646.000 ton muatan turun menjadi 359.000 ton tahun 1954. Di sisi lain para pegawai KPM mulai terpropokasi oleh luapan nasionalisme melalui pemogokan buruh. Banyak perusahaan Belanda dilumpuhkan oleh pegawai-pegawai Indonesia yang akhirnya KPM dinasionalisasi pada tanggal 6 Desember 1957. Karyawannya yang berjumlah 10.000 orang berasal dari orang Indonesia dialokasikan ke perusahaan PELNI pada tanggal 6 Juli 1958 (*Laporan tahunan Departement Pelayaran tahun 1958*).

Eksportir Kopra Makassar Sebuah Ekspansi

Di Indonesia Timur pada akhir abad ke-19 berbagai eksportir bergiat dalam usaha perkopraan. Di Menado muncul Perusahaan Kopra Jepang yaitu, Nanyo Buki Kaisha (NBK), Borsumij, Bouvy Gewbroeders, Correlje & Co., Dirks & Co., Morhmann Perusahaan Dagang Pasifik Selatan dan Menado, Vegetable Oil Company (Peter Post, hal. 228). Di Ambon muncul beberapa eksportir Cina seperti Kho Hong Gien, Ong Kie Hong, Tong Tek, Tjoean Djoe, Tong Hien dan Tjoeng Tien.

Selain itu juga di Ternate muncul perusahaan milik orang-orang Arab seperti perusahaan Sech Ahmad Bahaweres, Sech Nazar Allamana dan Sech Mohamad Abdul Ganie (Korte Berichten 1910-1911, hal. 253).

Di Makassar pada awalnya dimonopoli oleh pedagang-pedagang Cina, lalu muncul perusahaan Eropa Manders Seeman & Co, Oei Seeuwen & Co, Riiss & Co, W. B. Ledebor & Co, Michael Stephens & Co, Perusahaan Dagang Veth Bersaudara, A. Sch, Moreaux & Co, H.J. Valk Carl Schliepper & Co, Macasar Produce Co. Selain itu juga ada Perusahaan Dagang Makassar, Perusahaan Minyak Insulinde Makassar, Yayasan Sarana Pangan Hindia Belanda Coprafonds dan Opsir Pekerjaan Istimewa Khusus (OPIK) (Arsip Nasional Den Haag, *NHM Makassar* 5114 No 9611).

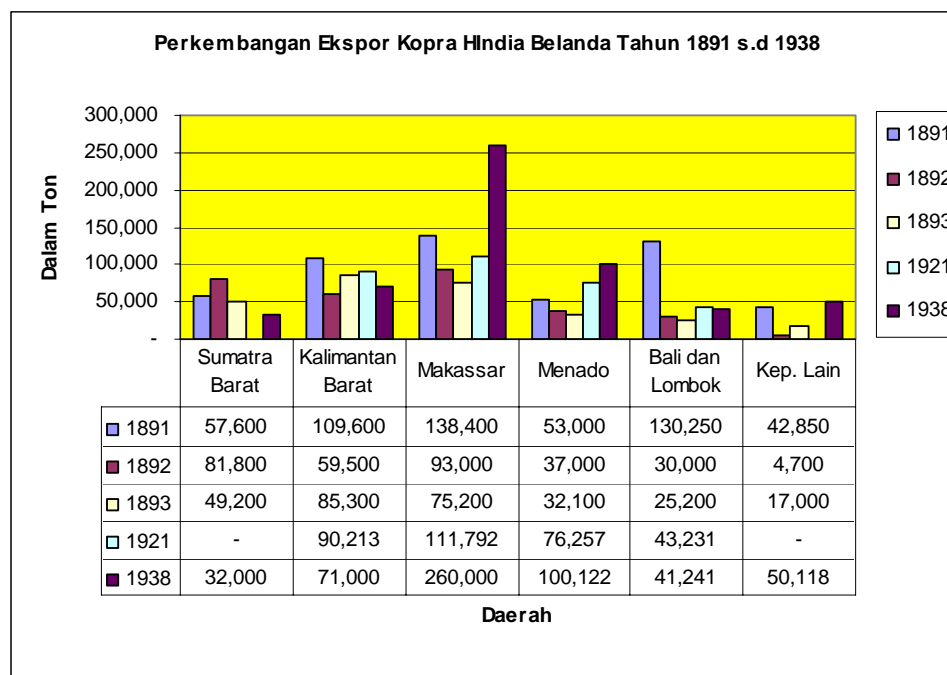
Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah pengekspor kopra utama Indonesia. Volume ekspor yang menjadikan urutan pertama itu bukan saja karena banyak pohon kelapa yang tumbuh di wilayah itu, tetapi lebih jauh lagi daerah itu merupakan pelabuhan transit dari berbagai daerah produsen kopra antara lain Manado, Kalimantan Barat, Sumatra Barat dan kepulauan lainnya (Grafik 1).

Grafik 1. menunjukkan bahwa meningkatnya ekspor kopra Makassar didorong oleh semakin terintegrasinya

wilayah produksi kopra dengan pelabuhan Makassar. Meningkatnya ekspor di Makassar itu berkembang pesat setelah tahun 1937 yaitu ketika pemerintah Hindia Belanda yang menetapkan Makassar sebagai pusat kegiatan pemerintah kolonial untuk wilayah Timur Besar.

Bila dibandingkan dengan lima negara-negara pengekspor kopra terbanyak dunia maka Hindia Belanda berada pada peringkat pertama, kemudian berturut-turut diikuti oleh Filipina, Malaya Inggris dan Ceylon. Sebelum Perang Dunia Pertama antara tahun 1909-1913 jumlah ekspor Hindia Belanda mencapai 2,38 juta ton, disusul berturut-turut Filipina 1,30 juta ton, Malaya Inggris 0,72 dan Ceylon 0,42 ton. Selanjutnya antara tahun 1924-1928, ketika kopra di pasaran dunia membaik negara-negara tersebut jumlah ekspor kopranya naik, Hindia Belanda tetap menduduki posisi tertinggi yaitu 3,64 juta ton, kemudian berturut-turut disusul Filipina 1,82 juta ton, Malaya Inggris 1,67 dan Ceylon 1,06 ton (Bacon dan Schloemer, 1940, hal. 295).

Bila dilihat secara rinci setiap periode maka ekspor kopra Hindia Belanda menunjukkan bahwa sejak tahun 1920 telah terjadi peningkatan yang pesat. Peningkatan itu terjadi antara tahun 1905-1914 yaitu berjumlah 20 % dari seluruh ekspor Hindia. Tujuan utama ekspor kopra



Sumber: Jaarverslag Handelsvereniging Makassar 1905-1948; Jaarverslag van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Makassar over het Jaar 1891-1905

Grafik 1. Perkembangan Ekspor Kopra Hindia Belanda Tahun 1891 s.d. 1938

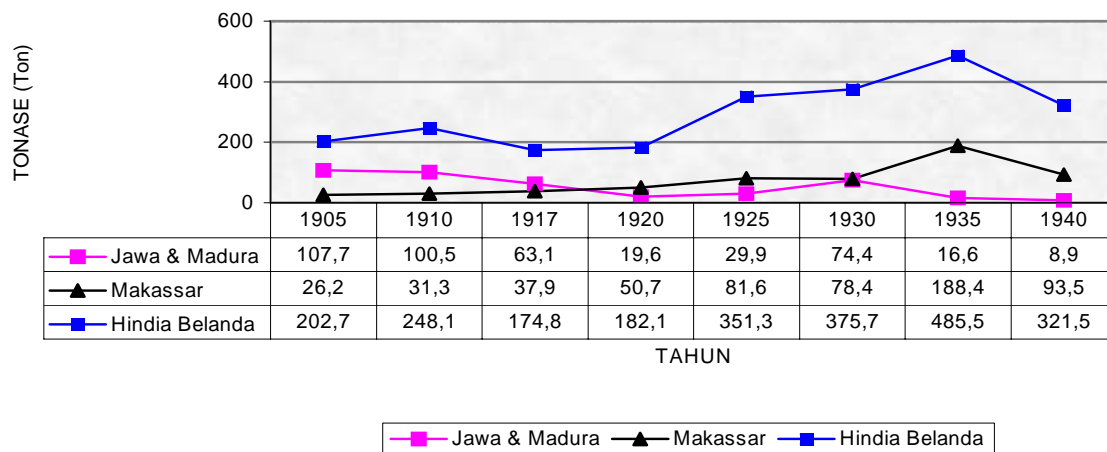
Makassar pada awal abad ke-20 sampai tahun 1915 adalah Prancis, yang mengimpor hampir separuh kopra dunia. Sebagian besar kopra di Prancis untuk kebutuhan industri rumah tangga (*eigen industrie*). Pasaran kopra terbesar kedua adalah Jerman. Sementara itu Belanda yang merupakan pedagang kopra dan mempunyai banyak pabrik margarin baru mulai menjadi pengimpor kopra yang diperhitungkan setelah tahun 1915 dan menjadi peringkat pertama pengimpor kopra pada tahun 1922. Peringkat selanjutnya adalah Denmark, Rusia dan Belgia. Demikian pula Inggris dan Amerika Serikat. Meskipun kedua negara itu merupakan pengimpor utama minyak kelapa dari Hindia Belanda. Namun juga kedua negara itu berperang mengurangi kerugian jika harga kopra secara mendadak merosot di pasaran dunia.

Secara umum, ketika itu ekspor kopra dari Jawa juga menurun. Hal itu disebabkan karena Jawa lebih terkonsentrasi pengelolaan kopra menjadi minyak. Sebaliknya, ekspor kopra luar Jawa terus meningkat. Peningkatan tersebut tidak lepas dari adanya kebijakan pemerintah kolonial agar daerah-daerah di luar Jawa lebih difokuskan pada produksi kopra, khususnya wilayah-wilayah di Timur Besar. Untuk lebih jelasnya, perkembangan ekspor kopra antara Jawa dengan Makassar dapat dilihat pada Grafik 2.

Grafik di atas menunjukkan bahwa kecenderungan ekspor kopra luar Jawa terus meningkat. Jawa yang sebelum tahun 1915 menjadi pengeksportir kopra yang cukup besar, berubah menjadi importir kopra. Alasan

pertama menurunnya ekspor kopra di Jawa adalah karena Pulau Jawa sejak tahun 1913 telah didirikan berbagai pabrik minyak kelapa. Seperti dengan munculnya Oliefabrieken Insulinde Hindia Belanda yang setiap tahunnya membutuhkan ratusan ton kopra dari luar Jawa. Akibatnya, Pulau Jawa yang sebelum Perang Dunia I penghasil kopra, menjadi eksportir minyak. Lain halnya daerah-daerah luar Jawa setelah Perang Dunia I lebih diarahkan oleh pemerintah kolonial sebagai pusat ekspor kopra, meski juga telah didirikan berbagai pabrik minyak dengan tujuan yang lebih politis. Selama tahun 1920, ekspor kopra dari Makassar sekitar 50,7 ton atau melampaui Pulau Jawa dan Madura yang hanya sekitar 19,6 ton. Daerah tujuan ekspor Makassar rata-rata sekitar 60 persen ke Belanda dan Perancis.

Seiringan dengan meningkatnya produksi kopra, di pasaran dunia juga muncul berbagai macam minyak yang berbahan dasar bukan kopra. Minyak tersebut banyak dibuat dari lemak ikan, penyu, babi, biji kapas, dan kacang-kacangan. Munculnya berbagai macam minyak selain kopra itu menyebabkan terjadinya kelebihan produksi. Akibatnya, harga kopra di pasar dunia terus menurun, terutama pada masa-masa depresi. Meski demikian, dalam surat rahasia Direktur Urusan Ekonomi GHC Hart kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 29 Juni 1935 No.63/AH digambarkan



Sumber: NHM Makassar, tahun 1905-1938, No Inv 5112-5113; FWT Hunger, *Cocos Nucifera: Handbook voor De Kennis van den Cocos-Palm in Nederlandsche Indie*, Zijn Eeschiedenis, Beschrijving, Cultuur, and Production Amsterdam: Scheltema & Holkema's Bookhandel, 1916, hal 124; *Jaarverslag van de Handelsvereniging Makassar*, 1905-1940; JHR Broeder, *Kwaliteits verbetering van Copra*, dalam *Economisch Weekblad*, 11 November 1932, hal 712.

Grafik 2. Perkembangan Ekspor Kopra Makassar dan Pulau Jawa pada Tahun 1905-1940

rasa optimisnya bahwa jatuhnya harga kopra di pasaran dunia hanya bersifat sementara. Ia menganggap pertumbuhan kopra tetap mempunyai prospek yang menguntungkan.

Melemahnya pasaran kopra dunia pada tahun 1930 sampai tahun 1932 lebih banyak disebabkan beredarnya produksi minyak ikan paus, minyak biji kapas, serta minyak dari kacang-kacangan. Jenis minyak tersebut sejak tahun 1929 atau menjelang awal krisis ekonomi, memang sudah cukup banyak tersedia. Jenis minyak itu bahkan tersimpan ratusan ribu ton di Eropa dan Amerika Serikat. Minyak jenis itu baru mulai berkurang pada awal tahun 1933. Seiring dengan itu, permintaan kopra juga membaik. Hal itu ditunjukkan dengan naiknya ekspor kopra Makassar ke Amerika dari 8,79 ton pada tahun 1930 menjadi 38.000 ton pada tahun 1933.

Sejak tahun 1931, sejumlah besar minyak biji kapas telah dibeli oleh pabrik-pabrik penggilingan gula di Amerika Serikat. Pembelian itu hanya berlangsung selama satu tahun. Memasuki tahun 1933, Amerika kekurangan lemak nabati. Baru pada tahun 1935, penggunaan minyak biji katun di Amerika mulai naik hingga mencapai 93.770.000 pon, bahkan mencapai 145.129.000 pon pada tahun 1936. Hal itu membuktikan bahwa naik turunnya permintaan kopra sangat ditentukan oleh munculnya lemak nabati lainnya.

Lain halnya di Eropa, fluktuasi penggunaan minyak kelapa sangat ditentukan oleh tersedianya minyak ikan paus di pasaran. Di Norwegia pada tahun 1936 misalnya, penggunaan minyak kelapa terus meningkat. Itu disebabkan karena pemerintah Norwegia mengeluarkan larangan penangkapan ikan paus pada tanggal 10 Juni 1935. Sejak itu, pemakaian kopra yang dipasok melalui Denmark terus meningkat. Sebaliknya, penggunaan minyak ikan paus terus menurun hingga hanya memakai sekitar 400 ribu ton pada tahun 1934-1935.

Munculnya fluktuasi harga kopra di pasaran dunia, baik di Amerika dan Eropa, menjadi alasan GHC Hart mengatakan bahwa jatuhnya harga minyak kelapa dan kopra hanya bersifat sementara. Menurut Hart, kemungkinan besar Hindia Belanda dapat menjual minyaknya kembali ke Amerika Serikat setelah tahun 1937, yaitu setelah produksi minyak (gemuk) non-kelapa mencapai puncaknya. Di Jerman, produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan minyak gemuk hanya 41 persen. Selebihnya, yaitu 59 persen, harus diimpor dari negara lain. Pemerintah Jerman berupaya meningkatkan produksi lemak dalam negerinya melalui pengembangan peternakan dan memperluas tanaman yang mengandung lemak, tetapi usaha itu gagal. Hal itu disebabkan karena lahan tidak cocok dan wilayah pengembangannya terbatas. Meski demikian, sejak tahun 1928, ekspor kopra ke Jerman terus mengalami

penurunan yang berarti. Ekspor kopra dari Jawa misalnya, dari 15.000 ton pada tahun 1928, turun menjadi 1000 ton pada tahun 1930. Sementara ekspor luar Jawa ke Jerman pada periode yang sama, dari 81.000 ton menjadi 43.000 ton. Menurunnya pasaran kopra pada periode itu disebabkan munculnya lemak gemuk Amerika Serikat.

Salah satunya negara yang tetap menjadi pengimpor kopra terpenting Hindia Belanda adalah Denmark. Sampai tahun 1935, negara tersebut masih mempunyai devisa yang cukup untuk mengimpor bahan lemak (gemuk), sehingga ekspor kopra ke Denmark dapat terus berlangsung tanpa rintangan. Hasil industri minyak Denmark setengahnya dikirim ke luar negeri, sisanya digunakan untuk kebutuhan pembuatan mentega. Karena itu, Denmark sebagai negara pengekspor mentega tidak tergantung pada pasaran margarin di luar negeri. Perkembangan konsumsi margarin di Denmark sebagian besar tergantung pada kemungkinan penjualan mentega Denmark keluar negeri, terutama ke Inggris.

Ketika harga kopra di pasaran dunia menurun dengan tajam pada tahun 1934, pasaran kopra di Eropa permintaannya mulai menurun. Banyak eksportir kopra Makassar mengeluh bahkan gulung tikar, termasuk Perusahaan Produksi Kopra Makassar (Macassar Produce Company) milik Denmark yang merupakan eksportir terkuat sejak tahun 1920-an tidak mampu melanjutkan usahanya. Akibatnya Pemerintah Hindia Belanda menunjuk Yayasan Sarana Pangan Hindia Belanda pada tahun 1936 untuk menangani pembelian kopra. Yayasan Sarana Pangan Hindia Belanda itu berkedudukan di Nederland dan memantau pembelian kopra di Hindia Belanda. Kebijakan pertama dilakukan adalah menurunkan harga kopra di pasaran lokal dan menaikkan biaya pengangkutan. Hal itu berakibat pada mengeluhnya berbagai wilayah produsen kopra. Itulah sebabnya dalam kongres Partai Celebes menjadi isu pembicaraan kaum pergerakan. Nadjamuddin Daeng Mallewa pimpinan Partai Celebes membuat mosi agar harga kopra lokal harus ditinjau ulang kembali untuk menambah pendapatan petani kelapa. Usulan itu tidak berhasil karena harga pasaran kopra terus jatuh di pasaran dunia. Depresi ekonomi yang melanda daerah-daerah produksi kopra mengakibatkan terganggunya kehidupan ekonomi.

Di Eropa pada musim semi 1935 terjadi penjualan sisa persediaan minyak ikan terutama ke Jerman. Sementara itu di Amerika Serikat sejak tahun 1931 minyak biji kapas dan katung juga terus meningkat sehingga kekurangan lemak nabati dapat teratasi. Dalam tahun 1935 persediaan minyak biji katun mencapai 42.196,55 ton dan menjadi 65.308,05 ton pada tahun 1936. Sementara itu kebutuhan minyak dari minyak kopra pada tahun 1935 sebesar 249.088,5 ton dan pada tahun 1936 menjadi 378.512,46 ton. (ANRI, Binnenlandsch-

Bestuur (BB). 116, Surat Direktur Urusan Ekonomi G.H.C. Hart kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 10 Desember 1935). Di Norwegia penangkapan ikan paus untuk dijadikan minyak sudah mulai dibatasi. Bahkan pada tanggal 10 Juni 1935 pemerintah negeri itu mengeluarkan larangan penangkapan ikan paus untuk melindungi ikan itu dari kepunahan. Akibat peraturan tersebut produksi minyak ikan paus tidak lagi sebanyak pada tahun 1934 yang mencapai 400.000 ton.

Diakui bahwa merosotnya harga kopra di pasaran Eropa dan Amerika bukan saja sebagai akibat perang Jerman terhadap Belanda. Namun juga karena melimpahnya produksi minyak lemak, seperti minyak ikan paus dan minyak dari biji kapas, dan berbagai minyak dari kacang-kacangan asal Afrika. Jenis minyak ini pada tahun-tahun malaise tersedia cukup banyak yang mencapai ratusan ribu ton. Pada tahun 1935 di Amerika Serikat kekurangan produksi di hampir seluruh produk pertanian, kecuali jenis minyak dari ikan yang cukup untuk persediaan konsumsi.

Di Jerman kebutuhan minyak lemak dalam negeri hanya mampu menyediakan 41 %, sisanya yaitu 59 % harus diimpor dari negara lain, termasuk kopra dari Hindia Belanda. Pemerintah Jerman memang sudah berupaya meningkatkan produksi minyak lemak negaranya dengan meningkatkan pengembangan peternakan dan memperluas tanaman yang mengandung lemak, tetapi itu belum cukup. Meskipun demikian sejak tahun 1930 ekspor kopra ke Jerman terus mengalami penurunan. Ekspor kopra dari Makassar ke Jerman misalnya pada tahun 1935 berjumlah 26.847 ton turun menjadi 4.035 ton pada tahun 1938 (Perpustakaan Nasional RI, *Jaarverslag van de Handelvereeniging Makassar over 1935*, hal 11-12; *Jaarverslag van de Handelvereeniging Makassar over 1938*, hal 10). Setelah penyerahan kedaulatan pada tanggal 29 Desember 1949 Coprafonds dinasionalisasi menjadi Yayasan Kopra. Ruang lingkungnya diperkecil dan dibentuk lembaga tandingan seperti Induk Kopra Indonesia (IKKI), NV. Kelapa (Pemberitaan, Pedoman Suara Rakyat Merdeka 21 Juni 1958).

Politik Perkopraan

Pemusatan Yayasan Kopra di Jakarta membuat wilayah-wilayah penghasil kopra mulai kehilangan haknya dalam menentukan tata niaga kopra. Di berbagai daerah produsen muncul sistem barter dengan atas nama kepentingan pembangunan daerah. Pemerintah Pusat selain berusaha mempertahankan Yayasan Kopra juga membuka peluang perusahaan lain bergerak di bidang tata niaga kopra. Sebaliknya di tingkat propinsi pemerintah daerah secara terang-terangan mengeksport kopra dengan sistem barter tanpa diketahui oleh Yayasan Kopra Pusat. Untuk memecahkan kedua perbedaan itu maka Menteri Ekonomi RI Isqak memutuskan agar pembelian dan penjualan kopra tidak

hanya dimonopoli oleh Yayasan Kopra tetapi juga diberikan kepada para eksportir nasional. Ia mengharapkan agar Yayasan Kopra dapat mengurangi monopolinya terhadap penjualan kopra, sehingga eksportir nasional lainnya dapat juga membeli dan menjual kopra. Isqak mengusulkan agar eksportir nasional bisa diberikan jata secara khusus minimal 15.000 ton perbulan. Dari hasil penjualan itu pemerintah berharap dapat memperoleh komisi sebesar dua persen. Dari hasil dana itu pemerintah bisa mensubsidi petani kelapa minimal Rp. 3 000.000. per tahun (Arsip Saleh Lahade, Reg. No. 325). Namun kebijakan itu tidak berhasil karena pihak Yayasan Kopra tetap bertahan sebagai lembaga ekonomi yang memonopoli kopra.

Ketidakberhasilan Kasimo (Partai Katolik) mempengaruhi Coprafonds dengan memberikan peluang kepada pengusaha nasional, membuat Kasimo diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengelola Yayasan Kopra. Ia diganti oleh Mr. R. Pratikno Sastrohadikusumo dari Partai Masyumi Indonesia (PMI). Dalam posisinya sebagai Ketua Dewan Pengelolah Yayasan Kopra, Mr. R. Pratikno juga berusaha mengurangi peran Yayasan Kopra dengan memberikan peluang yang luas kepada eksportir swasta, namun usaha itu tidak terwujud karena Persatuan Eksportir Nasional mengalami kesulitan pemasaran, hal itu disebabkan rata-rata pasaran kopra adalah perusahaan asing yang sekian lama telah terbangun jaringan perdagangan dengan Yayasan Kopra.

Ketidakpuasan pengelolaan Yayasan Kopra bukan saja terjadi di tingkat pusat tetapi juga di daerah, misalnya Soumokil sebagai pengurus Yayasan Kopra wilayah Maluku Selatan tidak mempercayai lagi Yayasan Kopra untuk menguasai pembelian kopra di daerah Maluku dan Papua New Guinea. Bahkan ia menuntut agar kopra tidak dijual lagi kepada Yayasan Kopra. Dalam tahun 1952 Soumokil melalui gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) menahan kopra dari Maluku dan Irian Barat. Menurut Soumokil alasan penahanan kopra dari kedua wilayah itu hanyalah bertujuan untuk menambah kas pembangunan daerah penghasil kopra. Ratusan ton kopra ditimbun di pelabuhan Sorong oleh organisasi RMS, bahkan pada tanggal 7 Maret 1952 organisasi RMS menuntut kopra itu sampai di tingkat pengadilan. Dalam perkara kopra itu Organisasi RMS memenangkan di Pengadilan sebagai pemilik yang sah dari berbagai partai kopra di daerah Sorong. Namun Pemerintah RI di Makassar atas nama Yayasan Kopra menolak hal itu dengan alasan tidak mengakui keberadaan Soumokil dalam kepemimpinan Yayasan kopra untuk wilayah Maluku (Arsip Buitenlandse Zaken Den Haag Reg 22).

Dalam konferensi raja-raja Sulawesi yang berlangsung pada tanggal 3-4 Februari 1952 juga menuntut

ditegakkanya Undang-Undang Otonomi Daerah no 22 tahun 1948 dan UUDS no 44 tahun 1950 yang menegaskan bahwa semua wilayah bekas Negara Indonesia Timur mempunyai hak asal usul yang sama seperti halnya pada masa sebelum kemerdekaan. Mereka mempunyai pemerintahan yang bersifat otonomi luas seperti halnya keistimewaan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Propinsi Yogyakarta. Para peserta konferensi kalau tuntutan otonomi luas tidak dipenuhi oleh Pemerintah Pusat maka akan membahayakan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah di Indonesia Timur (Arsip dan Perpustakaan Propinsi Sulawesi Selatan. Arsip pribadi M. Saleh Lahade Reg. 229. Dos. 13).

Tuntutan otonomi luas setiap tahunnya terus berkembang, bahkan Gubernur Sulawesi Selatan, pada tanggal 2 Februari 1957 Andi Pangerang Daeng Parani berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan tuntutan kepada menteri Dalam Negeri agar Propinsi Sulawesi Selatan diberi otonomi yang luas. Andi Pangerang Daeng Parani mengusulkan agar penghasilan daerah diberikan 70 % untuk pembangunan daerah dan 30 % untuk Pemerintah Pusat, juga meminta diberi modal sebesar Rp350 juta, untuk membiayai pembangunan Sulawesi. Dalam tuntutan itu Andi Pangeran Petta Rani mengancam pemerintah pusat bahwa jika tuntutan itu tidak dipenuhi dalam waktu satu bulan kemudian maka ia tidak akan bertanggungjawab terhadap kemungkinan yang akan terjadi di Sulawesi. (Jarrah Dam XIV/ Hasanuddin, hal, 25 Tahun Kodam XIV Hasanuddin).

Dalam melihat permasalahan munculnya kericuhan tata-niaga kopra minimal disebabkan oleh dua faktor

1. Konflik tata niaga kopra di Indonesia Timur terjadi karena pemerintah pusat bersaha mengendalikan tata-niaga kopra ke Jakarta
2. Dalam periode 1946-1949 Negara Indonesia Timur telah menerapkan keterbukaan dan otonomi luas. Para tokoh-tokoh daerah sepakat membubabarkan negara federal tetapi tidak sepakat melaksanakan model sentralisasi yang segala keputusan pembangunan daerah ditentukan oleh Jakarta (Compton, 1993).

Kedua faktor tersebut di atas pada prinsipnya adalah penegakan gagasan trilogi perjuangan daerah seperti yang disampaikan oleh pidato Bung Hatta pada tanggal 17 Oktober 1952. Tiga trilogi perjuangan daerah yang dimaksud itu adalah mengembangkan "*nation bulding*", asas-asas hak dan kebersamaan warga negara serta pembangunan "karakter identitas nasional". Gagasan tersebut tersebut selayaknya harus benar-benar dipahami oleh Pemerintah Pusat, sehingga hubungan antara pemerintah Pusat dan daerah tetap terjalin dengan kerangka Negara Kesatuan RI.

Metode Penelitian

Kerangka Pendekatan Teori

Tulisan ini akan menggunakan pendekatan "teori ekonomi konjungtur" (*conjuncture economy theory*) yang dikembangkan oleh Emmanuel Le Roy Ladurie. Emmanuel Le Roy Ladurie adalah sejarawan Prancis yang pada tahun 1960-an dikenal sebagai "pengganti" Fernand Braudel, karena pemikirannya yang brilliant dalam menjelaskan tentang masalah konjungtur (*conjuncture*) ekonomi. Hal itu digambarkan dalam eksplanasinya tentang "*The peasants of Languedoc*". Konsep tersebut digunakan untuk menganalisis turun naiknya dan timbul tenggelamnya perekonomian Languedoc di daerah pedalaman Prancis. Dalam eksplanasi doktoralnya itu, dijelaskan bahwa di balik konjungtur terdapat suatu dimensi waktu yang disebutnya "lingkaran agraria besar" (*a great agrarian cycle*). Lingkaran agraria besar mempengaruhi turun naiknya perekonomian masyarakat Languedoc. Dalam masyarakat petani Languedoc dibaginya atas tiga gejala ekonomi yaitu fase "ekspansi" (*expansion*), "kontraksi ekonomi" (*contracting*) dan "depresi" (*depression*). Pada fase ekspansi keadaan ekonomi petani Languedoc digambarkannya sebagai periode ekonomi yang mengagumkan. Ketika itu pendapatan petani anggur dan zaitun terus meningkat, para pedagang dan tenaga kerja terus berdatangan sehingga Languedoc penduduknya terus bertambah. Berbeda ketika keadaan ekonomi memasuki masa kontraksi, para petani pendapatannya mulai menurun, perluasaan tanah dan perkebunan anggur terbatas, petani banyak bermigrasi untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Para petani anggur mulai mendapat perhatian dari pemerintah agar anggur tidak terus merosot tajam. Di buatlah kebijakan kontrak-kontrak sepihak berupa monopoli.. Keadaan itu tidak bertahan lama, sampai memasuki fase terakhir yang disebutnya fase depresi ekonomi. Dalam depresi ekonomi petani anggur banyak jatuh miskin, perusahaan-perusahaan mengalami kebangkrutan. Dalam masa itu Emmanuel Le Roy Ladurie menyebutnya sebagai priode arus balik dari masa keagungan ke masa suram. Dalam masa itu keadaan politik tidak menentu, kerusuhan meningkat dan diakhiri dengan turunnya Raja Louis ke XIV di Prancis (Burke, 1990, hal.61-64).

Paradigma Emmanuel Le Roy Ladurie seperti diuraikan tersebut di atas, juga ditemukan dalam menjelaskan gejala ekonomi konjungtur Makassar dalam kurun kajian ini. Gejala ini bisa dilihat seperti apa yang oleh Le Roy Ladurie disebutnya paradigma "lingkaran agraria besar" (*a great agrarian cycle*) yang jangka waktu eksistensinya sangat pendek. Kenyataan itu terungkap dalam dokumen-dokumen sejarah di atas ketika ekspor kopra Makassar ditemukan dua fase konjungtur (*conjuncture*), yaitu masa ekspansi (1883-1930), kontraksi (1930-1958).

Dalam kajian ini usaha menampilkan dua fase, yaitu masa ekspansi seperti masa-masa sebelum tahun 1930 dengan menggunakan konsep pendekatan teori ekonomi Neo-Klasik yang oleh Robert M. Solow disebutkan sebagai masa pertumbuhan. Periode tersebut memiliki ciri utama seperti terus meningkatnya produksi, lapangan kerja dan perdagangan luar negeri juga meningkat dan situasi harga kopra cenderung stabil (Djojohadikusumo, 1994, hal.44-47)

Para ekonom, khususnya aliran teori Neo-Keynes (oleh Roy F. Harrod) menyebut masa ketidakstabilan, atau dalam teorinya disebut (*instability theorem*). Harrod mengemukakan bahwa di balik proses pertumbuhan terdapat juga unsur ketidakstabilan ekonomi yang diduga dapat mengganggu keseimbangan (ekuilibrium) ekonomi. Untuk menjaga ekuilibrium itu, dibutuhkan intervensi pemerintah. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan investasi negara, dan kalau dimungkinkan pemerintah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan ekonomi (Djojohadikusumo, 1994, hal. 36-39)

Untuk menjelaskan masalah peran negara, yaitu campur tangan pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar (Myint, 1971, hal. 291) maka yang menarik dilihat adalah intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi yang mengakibatkan mekanisme pasar terganggu (Gustafson, 1994, hal 3) Mekanisme pasar menekankan pada kebebasan atas kebutuhan pasar, tidak karena dihambat birokrasi yang didasarkan atas kepentingan kelompok tertentu (Evers, 1989, hal.5). Itulah sebabnya dominannya negara mengatur kehidupan ekonomi dianggap bertentangan dengan pandangan neoliberalisme yang berusaha mengurangi intervensi negara karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Neoliberalisme berkeyakinan bahwa kompetisi sepenuhnya pada sektor ekonomi, secara otomatis akan menyediakan sumber daya dan alokasi waktu. Peran negara tidak hanya menyediakan pembentukan pasar tetapi juga negara diharapkan tidak menekan/menghalangi terbentuknya pasar. Negara hanya mengatur mekanisme pasar dalam artian administrasi bukan politis. Sebaliknya alasan bahwa mekanisme pasar dapat berpotensi menghalangi bahkan dapat mematikan ekonomi masyarakat, jika tidak dikendalikan negara tidaklah benar karena peran negara dalam mekanisme pasar fungsinya terbatas yaitu pada masalah kebijakan ekonomi yang berintikan mengatur rotasi jalannya pasar. Dalam artian negara dibatasi oleh berbagai kepentingan, baik kepentingan perusahaan swasta, negara, maupun kepentingan perorangan. (Samuelson & Nordhaus, 1995, hal. 264) Teori neokorporatisme menganjurkan bahwa birokrasi negara sangat sulit mewakili keberadaan kepentingan organisasi kelangsungan masyarakat dalam pengembangan ekonomi. Juga diyakini bahwa birokrasi aparatur negara dapat menerapkan sepenuhnya

kebijakan ekonomi tanpa mengintervensinya. (Andrew Mac Intyre 1991, hal 12). Teori ini telah diterapkan di berbagai negara seperti Amerika Latin, Amerika Selatan, berbagai negara Barat, Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan juga Indonesia. Lebih jauh lagi dikenal dengan teori ketergantungan sosial dari neo korporatisme menunjukkan bahwa negara tetap berperan besar mengatur organisasi dan dapat menghubungkan kepentingan negara dan masyarakat. (Mac Intyre, 1991, hal. 17). Dalam konteks kajian perdagangan kopra Makassar menunjukkan dominannya negara mengatur perdagangan kopra menyebabkan tata niaga kopra di Makassar hancur di tahun 1958. Sejak tahun 1940 Pemerintah Belanda membentuk Coprafonds untuk memonopoli perdagangan kopra. Begitu pula setelah kemerdekaan Pemerintah Pusat menunjuk Territorium VII Wirabuana untuk mengatur perdagangan kopra, Meskipun kebijakan tersebut tidak direspon oleh pasar akibatnya, tataniaga kopra kacau yang pada akhirnya dapat mengancam integrasi daerah terhadap pemerintah pusat.

Sumber yang digunakan

Kajian ini terutama bersumber pada berbagai data primer yang tersimpan di Arsip Nasional Belanda di Den Haag, *Gemeente Archief* di Amsterdam, *Buitenlandse Zaken Archief* di Den Haag, Sumber-sumber Nationaal Archief Den-Haag (NAD) di Den Haag meliputi: *Nederlands Handel Maatschappij* (NHM), *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM), *Ministerie van Kolonien*, 1914-1952, *Ministerie van Economische Zaken van Landbouw*, 1918-1945, *Ministerie van Handel, Nijverheid* 1906-1922, *Collectie F.W.T. Hunger* 1874-1952, *Nederlands Commissariaat te Makassar* 1950-1957, *Memorie van Overgave van de Resident Celebes en Onderhoorigheden* 1905-1940. Arsip-arsip ini memuat catatan-catatan laporan perdagangan kopra, laporan ekonomi sosial dan politik, serta laporan dan perkembangan pengangkutan dan perdagangan kopra di Makassar. Arsip yang secara khusus memuat laporan tentang kopra adalah *Gemeente Archief Amsterdam* dan *Arsip Buitenlandse Zaken* di Den Haag. *Gemeente Archief Amsterdam* berisikan arsip *Oliefabrieken Insulinde Makassar* yang didalamnya memuat surat-surat transaksi perdagangan kopra di Hindia Belanda, masalah kredit dan perbankan yang menanamkan modalnya di Makassar. Arsip *Buitenlandse Zaken* Den Haag, di samping memuat laporan perkembangan politik perjuangan Permesta dan Republik Maluku Selatan juga memuat keterlibatan Militer dan Amerika Serikat dalam penyelundupan kopra.

Arsip Nasional Jakarta meliputi: *Gouvernement Secretarie, Inventaris van het Archief van de Algemene Secretarie en Het Kabinet van de Gouverneur Generaal* tahun 1944-1950. Kedua Sumber ini. Memuat *Besluit* tentang kebijakan perdagangan di pelabuhan Makassar,

perkebunan kelapa dan masalah-masalah keadaan ekonomi dan politik. Sumber yang lain adalah berisikan *Memorie van Overgave van de Recident van Celebes en Onderhoorigheden 1905-1940*. Dokumen ini bersikan laporan ringkas keadaan ekonomi, politik dan perdagangan pelayaran. Selain itu, kajian ini juga menggunakan dokumentasi kaset hasil wawancara dari M. Saleh Lahade, Riri Amin Daud, Kawilarang dan lain-lain. Arsip dan Perpustakaan Propinsi Sulawesi Selatan memuat arsip Selayar, Negara Indonesia Timur, Arsip Koleksi Pribadi Saleh Lahade dan Rahman Tamma, kesemuanya terdapat di Makassar. Sumber-sumber ini banyak memuat secara umum laporan perkembangan keadaan politik Wilayah Timur Besar, masalah-masalah perdagangan, termasuk keterlibatan militer dalam penyelundupan dan perdagangan kopra.

Sumber-sumber arsip yang telah diterbitkan, antara lain terdapat pada Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) di Leiden, Koninklijk Instituut Voor de Tropen (KIT) di Amsterdam dan Perpustakaan Nasional RI di Jakarta. Dalam KITLV terdapat berbagai sumber arsip seperti *De Bevolkingscultuur van Klapper in het Bijzonder Tammes*, P.M.L 1920, *Algemeene Voorwaarden voor den Verkoop van Copra Handelvereeniging van Makassar* 1910-1920, *Reglement van het Copra arbitrage-Bureau van de Handelen dan Instructie Omtrent de Samenstelling der Statistiek van Makassar 1887-1930*. Selain itu juga terdapat berbagai buku majalah dan koran yang berkaitan dengan Makassar sebagai kota dagang. Di Koninklijk Instituut Voor De Tropen (KIT) di Amsterdam terdapat sumber-sumber seperti *Gids van Makassar en Zuid Celebes*, *Departement van Economische Zaken* tahun 1938 dan tahun 1940, *Tijdschrift voor Economische en Sociale geografie: Nederlandshe Vereeniging voor Economische Geographie*, *Uit Nederland en Insulinde van Makassar: Letterkundige Causerie Jaarverslag van de Handelsvereeniging te Makassar Jaar 1921-1940*, *Celebes 1921-1934*;, *Begroting van Uitgaven en Ontvangsten van de Gemeente Makassar 1907-1936*. Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Negara ; Di Perpustakaan Nasional Jakarta terdapat sumber-sumber seperti . *Jaarverslag van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Makassar Jrg 1891-1927*, *Notulen van het verhandelde in de vergaderingen van den Raad van Gemeente-Makassar 1917-1941*; *Economische Berichten Oost Indonesia* tahun 1949; *The Economic Review of Indonesia* vol. 1 1947, Vol. 6 1952. *Biro Pusat Statistik*, ekspor impor beberapa pelabuhan di Indonesia tahun 1947-1958; *Biro Pusat Statistik Perdagangan dan Cukai Ekspor Impor di Hindia Belanda (Statistiek van den Handel en de In en Uitvoerrechten in Nederlandsch Indie 1900-1940 dan Staatsblad van Nederlandsch Indie)*. Di samping itu digunakan berbagai majalah, seperti *Berita Ekonomi* tahun 1951-1956, majalah *Mingguan Tempo Doeloe*. Sumber-sumber ini memuat

informasi tentang perdagangan di Makassar baik selama masa kolonial maupun setelah kemerdekaan.

Kesimpulan

Meluasnya ekspor kopra Makassar, yang berlangsung sejak tahun 1883 hingga tahun 1930, menjadi landasan bagi integrasi ekonomi di wilayah Indonesia bagian timur. Adapun masa ketegangan ekspor kopra Makassar yang berlangsung dari tahun 1930 hingga tahun 1958 adalah masa desintegrasi ekonomi. yang bercirikan mulai “pudarnya” sistem jaringan dalam perdagangan untuk memasuki masa-masa ketegangan. Baik ketika di masa ekspansi maupun kontraksi, kajian ini menunjukkan bahwa landasan integrasi ekonomi negara kepulauan (khususnya Indonesia bagian timur) adalah mengutama sistem jaringan perdagangan, baik ketika merespon tumbuhnya pasaran lokal maupun hubungannya dengan pasaran dunia.

Ketika terjadi perluasan, kopra tidak hanya diekspor ke Singapura tetapi telah meluas sampai ke pasaran Eropa dan Amerika. Tata-niaga kopra terkendali mengikuti pasaran lokal dan pasaran dunia, secara bersama-sama membentuk “trading houses”. Mereka bersaing sesuai dengan hukum pasar. Pemerintah kolonial membuat kebijakan ekspor berdasarkan respon pasar dengan menyediakan kredit dan subsidi pelayaran untuk mendukung sistem jaringan perdagangan. Salah satu manifestasi keadaan itu adalah sejalan dengan konsep pendekatan teori ekonomi Neo-Klasik yang oleh Robert M. Solow disebut sebagai masa pertumbuhan. Ciri utama priode ini adalah terus meningkatnya produksi, ekspansi usaha terus berkembang dan perdagangan luar negeri terus meningkat serta situasi harga terpelihara yang cenderung stabil.

Dalam negara kepulauan, tampaknya sistem jaringan perdagangan antar pelabuhan dan pulau sangat penting. Hal itu ditunjukkan ketika Makassar sebagai pusat perdagangan kopra di Hindia Belanda. Jaringan perdagangan didasarkan pada keterkaitan antara pelabuhan, sedangkan pelabuhan menggantungkan harapannya pada wilayah produksi. Hubungan kait mengait antara wilayah produksi dan pelabuhan membentuk integrasi ekonomi. Hal itu ditunjukkan Makassar ketika ekspor kopra Makassar menempatkan KPM sebagai media transportasi yang utama di wilayah Indonesia bagian timur.

Terintegrasinya Makassar dalam perdagangan kopra antar pulau di Indonesia bagian timur, mendorong Makassar sebagai kekuatan ekonomi Hindia Belanda dan mampu menahan laju perkembangan ekonomi Singapura, yang sejak paruh abad ke19 kedudukan Makassar mulai terancam sebagai pusat perdagangan di Indonesia Timur. Itulah sebabnya pada dasawarsa kedua

abad ke-20 Makassar muncul sebagai pelabuhan enterpot, seperti halnya kedudukan Singapura.

Dalam hubungan pembentukan ekonomi Eropa, tampaknya lebih merupakan soal perluasan ekonomi Makassar untuk mengimbangi Singapura. Bagi Belanda, komoditas kopra harus dimonopoli atau setidaknya jaringan perdagangan kopra antara Makassar dengan Singapura dikapalkan secara langsung ke Eropa. Dengan cara itu pedagang Cina lebih mudah diintegrasikan ke dalam pola ekonomi kolonial, dengan sendirinya perdagangan kopra ke Singapura dapat dihentikan. Bagi Singapura, pemberhentian itu merupakan ancaman ekonomi dalam ketergantunganannya dengan wilayah Indonesia bagian timur.

Ketika Makassar menjadikan kopra sebagai komoditas dagang utama, Makassar senantiasa memperlihatkan perubahan yang dinamis. Terbentuknya ekonomi perkopraan melalui pedagang pribumi dan Cina membawa perubahan besar dalam pembentukan ekonomi kepulauan, kopra mulai menjadi komoditas penting dalam perdagangan. Pedagang Cina yang semula hanya menjalin hubungan dagang pribumi secara perlahan-lahan menanamkan modalnya dalam pengembangan usaha perkopraan, petani kelapa yang semula menanam kelapa untuk kebutuhan lokal berubah menjadi kebutuhan niaga di pasar dunia.

Analisis integrasi kopra Makassar dengan pasaran kopra dunia dalam kajian ini dapat dikatakan sebagai pembenaran bahwa ekonomi Luar Jawa tumbuh dan berkembang karena terintegrasi dengan pasaran dunia. Kajian ini telah mengungkap bahwa "Sejarah ekonomi Luar Jawa harus dilihat secara terpisah dengan pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa". Selain itu kajian ini juga mengangkat suatu problematika penelitian, yakni kerangka sejarah ekonomi kepulauan, tentang "pentingnya jaringan perdagangan antar pulau di Indonesia Timur". J.T.H. Lindblad dan Jaroen L. Touwen mengemukakan bahwa jaringan perdagangan antar pulau di luar Jawa berkembang pesat karena berintegrasi dengan pasar dunia.

Daftar Acuan

Asba, Abd. Rasyid. 1996. "Produksi dan Kebijakan Ekspor Kopra Makassar 1927-1958". Jakarta: Tesis Universitas Indonesia.

Bacon L.C. dan F.C Schloemer. 1940. *World Trade in Agricultural Products, its Growth, its Crisis and the New Trade Politic* (Rome: Inter National Institute of Agriculture).

Clemens, A.H.P dan J.Th. Lindblad. 1989. *Het Belang van de Buitengewesten Economische Expansie en*

Koloniale Staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands Indie. 1870-1942, Amsterdam: Neha.

Cornelius. 1973. "*Tropical Science, Tropical Products Institute*", London: Vol.15 No. 1.

_____. 1947. "Politik Manifest Kabinet Nadjamoeidin", Pidato Pada Sidang Pertama Parlement Indonesia Timur.

De Groot, J.H.C. 1941. "Eenige Beschouwingen over de Copracontracten Ordobantie" *Koloniale Studien* No.28

De Prauwvaart in de 19 de Eeuw dalam *Koloniale Studien*, 1938.

Dick, H W. 1975. "Perahu Shipping in Eastern Indonesia". *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 23,1 104-121

Dol, J. 1949. "Copra en Coprafonds in Oost -Indonesie" *Landbouw* 21.85-102.

Eeghen, H.van. 1926. "De Handel in Copra" *Olien,vetten en Oliezaden* (jubileumnummer): 79-85.

_____. 1977. *Harvest of the Palm. Ecological Change in Eastern Indonesia*. Massachusetts & London : Harvard, U.P. Cambridge

Goedhart, O.M. 1920. "Nota Over de Inlandsche Rechtsgemeenschappen in de Onderafdeeling Sindjai en Seleirn" (ARA/ MvO KIT 1117).

_____. 1942 *Insulinde, Werk en Welvaart*, (Naarden: In den Toren)

Hal Hill,ed. 1989. *Regional Economic Development in Indonesia Since 1970*. New York: Oxford University Press.

Heersink, Christiaan.G. 1995. "The Green Gold of Selayar A Socio Economic History of an Indonesia Coconut Island C. 1600 -1950: Perspectives from a Periphery" *Academisch Proefschrift ter Verkrijging van de Graad van Doctor Aan de Vrije Universiteit te Amsterdam*.

Higgins, Benyamin. 1957. *Indonesia's Economic Stabilization and Development* New York: Institute of Pacific Relation.

Hunger, F.W.T. 1916. "Cocos Nucifera: Handboek voor de Kennis van den Cococs Palm in Nederlandsch-Indie, Zijn Geschiedenis, Beschrijving, Cultuur, en Producten, Amsterdam: Scheltema & Hlpkema' s Boekhandel.

_____. 1938. "De Paruw in De Wetgeving en In Het Adatrecht" dalam *Koloniale Studien*.

Jaspers. J.H.B. 1925. "Heiligverklaring bij de Boegineezen M.ill". Aarde en haar Volken. hal 69.

J.D. Legge. 1960. Central Authority and Regional Autonomy in Indonesia: A Study in Local Administration 1950-1960. New York. Cornell university Press.

John O. Sutter. 1959. "Indonesianisasi Politics a Changing Economy, 1940-1950 Volume II. The Indonesian Economy during the Revolution" Department of Far Eastern Studies Cornell University, Itaca New York Jilid.II.

Kawilarang. AJWH. 1912. *De Kalapper (Cocos Nucivera L.)*. Batavia: Depertemen van Landbouw, Nijverheid en Handel.

Kementrian Penerangan RI. 1953. Peringatan 125 Tahun Berdirinya De Javasche Bank 182-1953

Koning. J. 1918. "In het Soer Handel. Ver de Ontdekking van enorme Kwantiteiten Ijzererts op Celebes" *Indische Gids* 1918 II. 1109.

Leirissa. R.Z. 1991. *PRRI Permesta Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, Jakarta: Grafiti.

_____. 1994. Copracontracten "An Indication of Economic Development in Minahasa During the Late Colonial Period" Koninklijke Nederlandsche Academie van Wetenschappen , Amsterdam.

Lindblad, J.Th. 1988. "Computer Application in Expansion History". Survei Report. Leiden Centre for The History of European Expansion.

Lowell S. Gustafson ed. 1994. *Economic Development Under Democratic Regimes. Neoliberalism in Latin Amerika*, Praeger Publishers 88 Post Road West Westport, CT 06881.

Reyne, A. " De Cocospalm" in: C.J.J. van Hall & C. Van de Koppel ed. *De Landbouw in de Indische Archipel, 2a Voedingsgewassen en geneesmiddelen*. The Hague: Van Houve. halaman 427-525.

Roefsema, H.R. 1919. *De Kokos Cultuur*. Haarlem: N.V.H.D. Tjeenk Willink & Zoon.